

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI KABUPATEN KUTAI BARAT

Oleh:

**Yanuar Ishak
H. Eddy Soegiarto K
Rina Masyitoh Hariyadi**

Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
E-mail: yanuarishak95@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat melalui kontribusi sektor-sektor produksi yang membentuk nilai PDRBnya. Sepanjang tahun 2008, Sektor Pertambangan dan Penggalian masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kutai Barat dikarenakan kontribusinya yang cukup besar. Di tahun 2008 Sektor Pertambangan dan Penggalian menyumbang 52,61persen bagi nilai PDRB Kabupaten Kutai Barat. Sektor kedua yang dapat diandalkan adalah sektor Bangunan/konstruksi dengan kontribusi sebesar 17,76 persen. Sektor yang dapat diandalkan berikutnya adalah Sektor Pertanian dengan andil sebesar 15,69 persen. Berkaitan dengan upaya menyediakan anggaran bagi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tidak hanya mengandalkan sumber keuangan dari dana perimbangan, namun juga berupaya keras mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat berupa Retribusi Daerah. Hingga akhir tahun 2011 di Kabupaten Kutai Barat tercatat ada sebanyak 29 jenis pungutan retribusi yang disahkan DPRD Kabupaten Kutai Barat.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Mengetahui perbandingan antara realisasi dengan target capaian Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Barat, dan 2) Mengetahui besar kontribusi berasal dari retribusi daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Penelitian ini dibatasi pada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Retribusi Daerah selama kurun waktu 2003-2011. Selama kurun waktu tersebut ada beberapa jenis retribusi yang sudah tidak berlaku, namun ada juga beberapa jenis retribusi baru. Penentuan jenis Retribusi di Kabupaten Kutai Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Analisis dilakukan dengan cara Menghitung Besar Capaian Retribusi Daerah dan Menghitung Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Hipotesis ditolak, selama tahun 2003-2011 realisasi Retribusi Daerah memberi kontribusi yang masih rendah (kurang dari 25%) terhadap Pendapatan Asli Darerah Kabupaten Kutai Barat. 2) Realisasi Retribusi tertinggi dicapai pada tahun 2004, yaitu sebesar 150,48% dari target yang ditetapkan, sementara pada tahun yang sama realisasi PAD hanya sebesar 95,50%. 3) Realisasi PAD tertinggi dicapai pada tahun 2007 yaitu sebesar 96,95% dari target yang ditetapkan, sementara pada tahun yang sama realisasi Retribusi Daerah sebesar 122,78%.

Kata-kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Kutai Barat

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koswara (2000) dalam Aswarodi (2004: 35), mengatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat melalui kontribusi sektor-sektor produksi yang membentuk nilai PDRBnya. Sepanjang tahun 2008, Sektor Pertambangan dan Penggalian masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kutai Barat dikarenakan kontribusinya yang cukup besar. Di tahun 2008 Sektor Pertambangan dan Penggalian menyumbang 52,61persen bagi nilai PDRB Kabupaten Kutai Barat. Sektor kedua yang dapat diandalkan adalah sektor Bangunan/konstruksi dengan kontribusi sebesar 17,76 persen. Sektor yang dapat diandalkan berikutnya adalah Sektor Pertanian dengan andil sebesar 15,69 persen.

Namun , jika dilihat lagi, dua dari tiga sektor yang diandalkan di Kabupaten Kutai Barat adalah Sektor Primer yang masih sangat tergantung dengan sumber Daya Alam yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat harus dapat mengembangkan sektor-sektor yang lain agar perekonomian di wilayahnya tidak bergantung pada kondisi alam yang ada.

Berkaitan dengan upaya menyediakan anggaran bagi pembangunan, Pemerintah kabupaten Kutai Barat tidak hanya mengandalkan sumber keuangan dari dana perimbangan, namun juga berupaya keras mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat berupa Retribusi Daerah. Hingga akhir tahun 2011 di kabupaten Kutai Barat tercatat ada sebanyak 29 jenis pungutan retribusi yang disahkan DPRD kabupaten Kutai Barat. Retribusi yang terkumpul bersifat fluktuatif sehingga secara kumulatif bila digabungkan dengan sumber-sumber PAD lainnya akan mempengaruhi perolehan PAD setiap tahunnya. Meskipun terjadi kenaikan sumber retribusi dari 9

jenis pada tahun 2001 menjadi 16 jenis pada tahun 2011 namun dana yang diperoleh mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sementara itu, di sisi lain masih ada 13 jenis retribusi yang belum dapat menghasilkan. Padahal Kabupaten Kutai Barat memiliki prospek yang baik khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah.

2. DASAR TEORI

A. Manajemen Keuangan Daerah

Untuk mengetahui secara nyata kemampuan suatu daerah dalam mengurus daerahnya sendiri adalah salah satunya dengan melihat pada kemampuan keuangan daerah yang dimiliki. Sebab dalam konteks otonomi daerah maka suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya harus dapat mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Meskipun adanya perimbangan keuangan dari pusat kepada daerah dalam pembiayaan daerah, tetapi suatu daerah diharapkan dapat memiliki kemandirian dalam mengurus daerahnya sendiri.

B. Retribusi Daerah

Sumber-sumber keuangan yang dapat dipungut langsung oleh pemerintah dari masyarakat adalah Pajak Daerah dan Retribusi. Melalui Pajak dan Retribusi inilah dana dikumpulkan dan disalurkan untuk membiayai pembangunan. Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu disebut Wajib Retribusi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagi Obyek Retribusi sebagai berikut: Jasa umum, Jasa usaha dan Perizinan tertentu.

C. Pendapatan Asli Daerah

Kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan di masa lalu, dimana banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat karena direncanakan dari atas dan bukan dari masyarakat setempat, hendaknya tidak terulang lagi dan paradigma tersebut hendaknya diubah, dengan melibatkan elemen masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut, maka pemerintah daerah otonomi hendaknya diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam mengurus

rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, agar semua potensi yang dimiliki dapat dikelola dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pendapatan yang merupakan sumber-sumber keuangan daerah (Anonim, 2000: 6) sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pinjaman Daerah
- 4) Lain-lain penerimaan yang sah

1) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya dipungut langsung oleh daerah yang terdiri dari:

a) Pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Pajak daerah yang pengelolaannya ditangani langsung oleh Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

b) Retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu.

c) Laba perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu kontribusi badan usaha milik daerah kepada Pemerintah daerah.

d) Lain-lain pendapatan yang sah meliputi jasa giro dan penjualan aset tetap daerah.

2) Pemberian dana perimbangan ini merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pelaksanaan desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal

3) Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

4) Lain-lain penerimaan yang sah adalah suatu pembiayaan yang dianggarkan dan/atau tidak teralokasikan dalam anggaran antara lain yang disebut dengan hibah dan dana darurat serta penerimaan lainnya sesuai undang-undang yang berlaku.

3. Alat Analisis

Untuk memecahkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka digunakan alat analisis distribusi prosentasi, dengan rumus sebagai berikut:

1. Menghitung Besar Capaian Retribusi Daerah

$$P = \frac{P_t}{P_0} \times 100\% \dots\dots\dots (\text{Supranto, 2000: 2})$$

Dimana :
 P = Capaian Retribusi Daerah (%)
 P_0 = Target Capaian Retribusi Daerah tahun-t (Rp)
 P_t = Realisasi Retribusi Daerah tahun-t (Rp)

2. Menghitung Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

$$P_{pd} = \frac{P_t}{P_{dt}} \times 100\% \dots\dots\dots (\text{Supranto, 1999: 2})$$

Dimana:
 P_{pd} = Kontribusi besarnya sumbangan dari Retribusi Daerah dalam waktu tertentu
 P_t = Realisasi Retribusi Daerah tahun-t (Rp)
 P_{pd} = Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun-t (Rp)

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut :

$H_0 : \mu_1 \geq \mu_2$;, artinya realisasi sama dengan atau lebih besar (retribusi sesuai) dengan Target pencapaian terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat. (Hipotesis Ditolak)

Ha : $\mu_1 < \mu_2$, artinya realisasi retribusi lebih kecil dari Target pencapaian terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat. (Hipotesis Diterima)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Realisasi Penerimaan Kabupaten Kutai berasal dari Retribusi Daerah selama tahun 2003-2011 cenderung meningkat. Pada tahun 2003 realisasi Retribusi sebesar 134,79% sedangkan PAD sebesar 0,08%. Kontribusi Retribusi terhadap PAD sebesar 32,82%. Artinya realisasi Retribusi lebih tinggi dari target capaian (34,79%) dibanding realisasi PAD yang lebih rendah dari target capaian (-99,92%).

Tahun 2004 realisasi Retribusi sebesar 150,48% sedangkan PAD sebesar 95,50%. Kontribusi Retribusi terhadap PAD sebesar 21,73%. Artinya realisasi Retribusi lebih tinggi dari target caoaian (50,48%) dibanding realisasi PAD yang lebih rendah dari target capaian (-4,50%).

Tahun 2005 realisasi Retribusi sebesar 45,66% sedangkan PAD sebesar 30,47%. Kontribusi Retribusi terhadap PAD sebesar 30,49%. Artinya realisasi Retribusi lebih rendah dari target capaian (-54,34%) sama dengan realisasi PAD yang juga lebih rendah dari target capaian (-69,53%).

Tahun 2006 realisasi Retribusi sebesar 111,11% sedangkan PAD sebesar 86,36%. Kontribusi Retribusi terhadap PAD sebesar 28,68%. Artinya realisasi Retribusi lebih tinggi dari taget capaian (11,11%) dibanding realisasi PAD yang lebih rendah dari target capaian (-13,64%).

Tahun 2007 realisasi Retribusi sebesar 122,78% sedangkan PAD sebesar 96,95%. Kontribusi Retribusi terhadap PAD sebesar 10,41%. Artinya realisasi Retribusi lebih tinggi dari target capaian (22,78%) dibanding realisasi PAD yang lebih rendah dari target capaian (-3,05%).

Tahun 2008 realisasi Retribusi sebesar 35,04% sedangkan PAD sebesar 44,37%. Kontribusi Retribusi terhadap PAD sebesar 35,97%. Artinya realisasi Retribusi lebih rendah dari target capaian (-64,96%) sama dengan realisasi PAD yang lebih rendah dari target capaian (-55,63%).

Tahun 2009 realisasi Retribusi sebesar 69,43% sedangkan PAD sebesar 111,67%. Kontribusi Retribusi terhadap PAD sebesar 8,56%. Artinya realisasi Retribusi lebih rendah dari target capaian (-30,57%) sama halnya dengan realisasi PAD lebih rendah dari target capaian (-11,67%).

Tahun 2010 realisasi Retribusi sebesar 85,92% sedangkan PAD sebesar 49,20%. Kontribusi Retribusi terhadap PAD sebesar 16,19%. Artinya realisasi Retribusi lebih rendah dari target capaian (-14,08%) sama halnya dengan realisasi PAD lebih rendah dari target capaian (-50,80%).

Tahun 2011 realisasi Retribusi sebesar 107,06% sedangkan PAD sebesar 66,15%. Kontribusi Retribusi terhadap PAD sebesar 16,08%. Artinya realisasi Retribusi lebih tinggi dari target capaian (7,06%) dibanding realisasi PAD yang lebih rendah dari target capaian (-33,85%).

Kontribusi yang kecil (kurang dari 25%) menunjukkan upaya pemerintah kabupaten Kutai Barat dalam menggali sumber penerimaan daerah berasal dari Retribusi Daerah masih jauh dari harapan. Hal ini juga sebagai indikasi bahwa eksistensi sektor-sektor pembangunan yang menghasilkan Retribusi masih sangat kecil. Ketergantungan yang begitu besar terhadap kontribusi sektor pertambangan dan penggalian membuat pemerintah kurang kreatif dalam menghidupkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan lebih mampu bertahan terhadap terpaan krisis ekonomi. Sementara sektor pertambangan dan penggalian yang dianggap memberi kontribusi cukup besar hanya mampu menyediakan lapangan pekerjaan relatif terbatas, namun memberi dampak pada kerusakan lingkungan lebih besar dan juga berpotensi mengganggu pertumbuhan sektor pertanian justru diberi kesempatan yang lebih luas untuk beroperasi. Kondisi demikian mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah cenderung menurun. Kiarena pemerintah cenderung banyak berharap pada Dana Bagi hasil dan Dana Perimbangan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membuka peluang yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan Retribusi (berasal dari jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu) mengingat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Alasan yang cukup kuat pemberian hak dan kewenangan otonomi bagi pemerintah daerah adalah dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan secara adil dan mandiri untuk kesejahteraan masyarakat. Agar keuangan daerah mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat seharusnya mengurangi ketergantungan pembiayaan dari Pemerintah (Pusat).

Meskipun pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang memiliki kemampuan profesionalisme dan layak dipercaya ikut melaksanakan sebagai tugas pemungutan jenis Retribusi tertentu secara efisien.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan atas masalah yang telah di kemukakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hipotesis ditolak, selama tahun 2003-2011 realisasi Retribusi Daerah memberi kontribusi yang masih rendah (kurang dari 25%) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- 2) Realisasi Retribusi tertinggi dicapai pada tahun 2004, yaitu sebesar 150,48% dari target yang ditetapkan, sementara pada tahun yang sama realisasi PAD hanya sebesar 95,50%.
- 3) Realisasi PAD tertinggi dicapai pada tahun 2007 yaitu sebesar 96,95% dari target yang ditetapkan, sementara pada tahun yang sama realisasi Retribusi Daerah sebesar 122,78%.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyampaikan beberapa saran berikut:

- 1). Pemerintah Kabupaten Kutai Barat belum maksimal dalam menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Retribusi Daerah. Karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
- 2). Agar dapat mandiri diperlukan langkah inovatif mencari peluang dari dunia usaha yang melakukan

eksplorasi maupun eksploitasi sumberdaya alam di Kabupaten Kutai Barat.

- 3). Diperlukan adanya perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Hal ini dilakukan agar tumbuh kesadaran masyarakat dan dunia usaha membayar kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Anonim, 2004. *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Pustaka Pergaulan, Jakarta.
- [2]Aswarodi, 2004. *Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan; Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- [3]Baridwan, Zaki., 2002. *Intermediate Accounting. Edisi Ketujuh*. BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- [4]Higgins, Robert C., 2007. *Analysis for Financial Management*. Eight Edition. McGraw-Hill, Washington.
- [5]Kuncoro, Haryo, 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akutansi X.
- [6]Mamesah. D.J. 2004, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [7]Musgrave, R.A dan Peggy B Musgrave., 2003. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi Kelima. Erlangga, Jakarta.
- [8]Reksohadiprodjo, Sukanto., 2000. *Ekonomi Publik*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- [9]Sidik, Mahfud., 2000. *Kebijakan Fiskal Nasional untuk Mendukung Otonomi Daerah*. Seminar Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan, Yogyakarta.
- [10]Soemita, R., 2001. *Manajemen Keuangan*. Sinar Baru, Bandung.
- [11]Supranto, J., 2000. *Statistik Deskriptif*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [12]Supriatna, Yahya, 2000, *Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

- [13]Suprihanto, Jhon., 2003. *Manajemen Modal Kerja; Teori dan Penerapan*. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. BPFE-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- 14]Syamsi, Ibnu, 2003, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta.
- [15]Weston, J. F. dan Eugene F. Brigham, 2001. *Managerial Finance*. Seven Edition. The Dryden. Hinsdale, Illionis.

